



BPBD PROVINSI JAWA TIMUR

**RENCANA
KONTINGENSI
BENCANA ERUPSI
GUNUNGAPI SEMERU
PROVINSI JAWA TIMUR**



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan ini kita secara bersama-sama dapat merampungkan dan menerbitkan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Semeru Tahun 2022.

Rencana Kontingensi sebagai salah satu langkah awal dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak bencana memerlukan perhatian dan komitmen kita bersama. Perlu kita sadari bahwa dalam upaya penanggulangan bencana diperlukan peran aktif, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Diperlukan keterpaduan dan kerjasama solid dari segenap stakeholder yang ada, agar apa yang telah kita susun, kita sepakati untuk kemudian kita terbitkan sebagai Dokumen Rencana Kontingensi tidak hanya menjadi sekedar dokumen saja yang tidak ada gunanya.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Kontingensi dipahami sebagai suatu kemampuan untuk melakukan perkiraan terhadap segala kemungkinan ancaman bencana yang akan terjadi walaupun belum tentu perkiraan tersebut terjadi. Untuk mendapatkan perkiraan yang mendekati realitas, maka disusunlah skenario dan tujuan yang disepakati bersama oleh para pihak. Skenario dan tujuan inilah yang kemudian dikembangkan sebagai dasar penyusunan rencana tindakan teknis dan manajerial dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko secara lebih baik dalam situasi darurat.

Penyusunan Dokumen ini didasarkan pada tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh komponen Pentahelix dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Api Semeru. Melalui dokumen ini diharapkan semua pihak lebih siap menghadapi ancaman Bencana Erupsi Gunung Api Semeru di masa yang akan datang.

Sidoarjo, Desember 2022

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Kebijakan Dan Strategi	3
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.5. Ruang Lingkup	4
1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses	5
1.7. Umpan Balik	5
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran.....	6
1.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi	6
 Bab 2. Situasi Jenis Bahaya, Skenario Kejadian, Dan Asumsi Dampak.....	 7
2.1. Karakteristik Bahaya	7
2.2. Skenario Kejadian.....	8
2.3. Asumsi Dampak.....	9
 Bab 3. Tugas Pokok dan Sasaran.....	 15
3.1. Tugas Pokok	15
3.2. Sasaran.....	15
 Bab 4. Pelaksanaan	 17
4.1. Konsep Operasi Dan Sasaran Tindakan	17
4.2. Struktur Organisasi Komando	21
4.3. Kegiatan Pokok.....	22
4.4. Instruksi Koordinasi	50

Bab 5. Administrasi Dan Logistik.....	51
5.1. Administrasi	51
5.2. Logistik	52
 Bab 6. Kebutuhan, Ketersediaan, Kesenjangan dan Strategi Pemenuhan Sumber Daya	 54
6.1. Kebutuhan, Ketersediaan, dan Kesenjangan Sumber Daya	54
6.2. Strategi Pemenuhan Sumber Daya.....	54
 Bab 7. Pengendalian.....	 56
7.1. Komando	56
7.2. Pos Komando, Pos AJU, Pos Pendukung, Pos Pendamping, dan Pos Lapangan.....	56
7.3. Komunikasi	56
 Bab 7. Rencana Tindak Lanjut	 57
7.1. Komitmen Para Pihak Dalam Penanganan Kedaruratan	57
7.2. Latihan Kesiapsiagaan.....	57

Lampiran-lampiran

1.1. LATAR BELAKANG

Semeru merupakan Gunung tertinggi di Pulau Jawa. dengan puncaknya Mahameru, mempunyai ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Posisi Gunung ini terletak di antara wilayah administrasi Kabupaten Malang dan Lumajang, dengan posisi geografis antara 8°06' LS dan 120°55' BT. Semeru adalah gunungapi aktif tipe-A yang kerap meletus sampai saat ini. Sejarah letusan Gunung Semeru tercatat sejak 1818 dan sejak tahun 1967 hingga sekarang aktivitas Gunung Semeru tidak pernah berhenti, dengan pusat kegiatan di Kawah Jonggring Seloko, sebelah Tenggara Puncak Mahameru ke Wilayah Lumajang-Jawa Timur.

Letusan Gunung Semeru umumnya bertipe vulkanian dan strombolian. Letusan tipe vulkanian dicirikan dengan letusan eksplosif yang kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya dan selanjutnya terjadi letusan bertipe strombolian yang biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru.

Letusan Gunung Semeru lebih berbahaya apabila disertai hujan deras, karena akan mengakibatkan terjadinya banjir lahar. Sehubungan dengan kondisi tersebut, menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lebih baik dengan menyusun kebijakan dalam mitigasi bencana. Kesiagaan bencana Pemerintah Kabupaten Malang terhadap adanya ancaman bahaya Erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu kerangka dasar penanggulangan bencana.

Kerangka dasar penanggulangan bencana dengan paradigma pengurangan risiko bencana menjadi salah satu dasar penyusunan dokumen perencanaan kontijensi yang dapat digunakan sebagai pedoman pada saat darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana. Dengan demikian pada saat tanggap darurat bencana semua sumber daya yang ada dapat dimobilisasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Rencana Kontingensi merupakan upaya dan inisiatif dalam penanganan darurat bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di suatu daerah. Secara spesifik rencana kontingensi bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategis dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana pada saat penanganan darurat bencana secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ketika suatu jenis bencana terjadi.

Penerapan Rencana Kontingensi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rencana Kontingensi disusun pada keadaan diperkirakan potensi suatu ancaman akan terjadi. Apabila bencana benar terjadi, maka Rencana Kontingensi dapat diaktivasi atau dioperasionalisasikan menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana setelah terlebih dahulu melalui pengkajian cepat.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Semeru ini melandaskan pada sejumlah regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur.

1.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka menghadapi dan menangani situasi darurat yang disebabkan bencana erupsi gunung api semeru, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Lumajang perlu mengambil beberapa kebijakan dan strategi yang menjadi landasan kegiatan penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Semeru, sehingga mampu melakukan kegiatan penanggulangan bencana secara efektif dan terkoordinasi dengan baik. Adapun

kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut :

1.3.1 KEBIJAKAN PENANGANAN DARURAT

1. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penanganan darurat bencana yang melibatkan semua pihak terkait;
2. Mengutamakan penyelamatan Jiwa manusia terutama untuk kelompok masyarakat rentan;
3. Memberikan rasa aman kepada para pengungsi dan harta bendanya, baik di tempat pengungsian maupun di lokasi bencana;
4. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang telah terkoordinasi untuk membantu proses pencarian dan pertolongan serta evakuasi masyarakat terdampak bencana;
5. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang telah terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
6. Optimalisasi Pos Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk penanganan darurat bencana;
7. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, dan lembaga non Pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel;
8. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap untuk korban bencana;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana;
10. Menyiapkan desa-desa yang berada di wilayah penyangga bersedia membantu warga desa terdampak utama.

1.3.2 STRATEGI PENANGANAN DARURAT

1. Penetapan status tanggap darurat;
2. Membentuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang sesuai dengan regulasi dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
3. Pendataan, perencanaan kegiatan, laporan, evaluasi dan informasi berbasis teknologi;

4. Menyiapkan tempat pengungsian beserta sarana prasarana pendukungnya;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi;
6. Pengadaan kebutuhan Layanan Dukungan Psikologi (LDP);
7. Berkoordinasi dengan OPD/Lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas penanganan darurat bencana;
8. Berkoordinasi dengan OPD/Lembaga terkait serta membentuk Tim percepatan penggunaan Pos Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
9. Melibatkan pihak Akademisi/Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan penanganan darurat;
10. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi harian terhadap pelaksanaan penanganan darurat bersama OPD/Lembaga terkait.
11. Menyusun Peraturan Bersama antar Kepala Desa (Permakades) di Desa Kawasan Rawan Bencana dengan Desa penyangga.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Kontingensi ini dimaksudkan sebagai dasar acuan bagi para pihak dalam rangka pelaksanaan kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Semeru.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Semeru adalah sebagai pedoman perencanaan kedaruratan yang memuat penilaian bahaya, skenario kejadian, skenario dampak, penentuan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral/bidang operasi dan tindak lanjutnya.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana Erupsi Gunung Api Semeru, antara lain :

1. Pembagian peran dan tanggung jawab antara Provinsi dan Kabupaten maupun sektor terkait;

2. Dokumen Rencana Kontingensi yang disusun ini menempatkan Kabupaten sebagai Komando sedangkan Provinsi sebagai pendamping dan pendukung;
3. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat;
4. Proyeksi kebutuhan klaster/bidang operasi;
5. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor;
6. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan–kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana;
7. Pelaksanaan geladi sebagai metode/alat uji coba Rencana Kontingensi.

1.6 PENDEKATAN, METODE DAN TAHAPAN PROSES

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Rencana Kontingensi ini disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Semeru.

Kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Semeru ini memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pihak yang terlibat tentang pentingnya Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Semeru;
2. Pengumpulan data sumberdaya;
3. Pelaksanaan FGD untuk menyepakati skenario kejadian, skenario dampak, kebijakan dan strategi didalam penanganan darurat;
4. Melakukan analisis data sumberdaya yang dimiliki untuk kemudian dibandingkan dengan kebutuhan penanganan darurat;
5. Menyepakati strategi pemenuhan kesenjangan sumberdaya didalam penanganan darurat.

1.7 UMPAN BALIK

Umpan balik yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi ini adalah Rencana Kontingensi ini dapat menyesuaikan dengan situasi terbaru dari kondisi Gunung Api Semeru sehingga diperlukan masukan-masukan terutama terkait

data-data untuk kemudian dilakukan review terhadap Rencana Kontingensi yang telah disusun.

1.8 MASA BERLAKU DAN PEMUTAKHIRAN

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Semeru ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun. Agar Rencana Kontingensi ini dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru misalnya perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk/jenis kerentanan, perubahan kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

1.9 KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI

Rencana Kontingensi ini menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru. Aktivasi Rencana Kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat kejadian bencana.

BAB 2

SITUASI JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN, DAN ASUMSI DAMPAK

2.1. KARAKTERISTIK BAHAYA

Fenomena Gunung Api merupakan fenomena geologi yang tidak menentu, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika magma. Oleh karena itu, waktu dan besaran letusan Gunung Api termasuk Gunung Semeru tidak bisa ditentukan secara pasti. Namun demikian, monitoring Gunung Api Semeru secara kontinyu melalui peralatan monitoring yang dipasang di seputar Gunung Api dapat memberikan informasi gejala peningkatan aktivitas Gunung Api. Dengan demikian antisipasi terhadap peningkatan gejala aktivitas tersebut dapat dijadikan dasar dalam sistem peringatan dini.

No	Aspek	Uraian
1.	Tipe	Vulkanian dan Strombolian Letusan Gunung Semeru umumnya bertipe vulkanian dan strombolian. Letusan tipe vulkanian dicirikan dengan letusan eksplosif yang kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya dan selanjutnya terjadi letusan bertipe strombolian yang biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru
2.	Pemicu	1. Aktivitas vulkanik Gunung Api Semeru 2. Curah Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di puncak Gunung Api Semeru yang mempengaruhi kestabilan kubah lava
3.	Bahaya Primer	1. Awan panas letusan 2. Awan panas guguran 3. Aliran lava pijar

		4. Guguran batu 5. Gempa akibat aktivitas vulkanik gunung
4.	Bahaya Skunder	Lahar Hujan
5.	Tanda-tanda	1. Aktivitas vulkanik Gunung Api Semeru mengalami peningkatan 2. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama lebih dari 1 Jam di puncak Gunung Api Semeru yang mempengaruhi kestabilan kubah lava
6.	Akibat Kerusakan	Elemen terpapar : Manusia, Bangunan (rumah/pemukiman), fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah, infrastruktur (jalan, jembatan), lahan pertanian (sawah, kebun, ladang), dan ternak. Akibat yang dialami: Putus akses, ekonomi tersendat, kesehatan berisiko, lingkungan rusak, kegiatan pendidikan terganggu, timbul korban jiwa, pelayanan pemerintah terganggu.

2.2. SKENARIO KEJADIAN

Skenario kejadian ini disusun berdasarkan histori kejadian Awan Panas Guguran (APG) Gunung Api Semeru Tanggal 4 Desember 2021 dan 4 Desember 2022 serta pendapat para ahli.

1. Pada pukul 13.00 WIB, Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru di Pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro mencatat terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik;
2. PPGA Semeru mencatat terjadinya getaran banjir lahar tercatat mulai pukul 14.47 WIB dengan amplitudo maksimal 20 milimeter;

3. Pada pukul 15.10 WIB, PPGA Semeru kemudian melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik;
4. Catatan yang dihimpun PPGA Semeru, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500-800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah;
5. Teramati awan panas guguran dengan jarak 12 Km dari puncak;
6. Sebaran material erupsi berupa lontaran batuan pijar diperkirakan dapat mencapai radius 8 KM dari puncak, sedangkan material lontaran berukuran abu saat ini mencapai 12 Km ke arah tenggara. Arah dan jarak sebaran material abu ini dapat berubah tergantung arah dan kecepatan angin;
7. Lokasi terdampak untuk Kabupaten Lumajang terdiri dari 8 Kecamatan (44 Desa), sedangkan untuk Kabupaten Malang terdiri dari 4 Kecamatan (17 Desa).

2.3. ASUMSI DAMPAK

Berdasarkan histori kejadian Awan Panas Guguran (APG) Gunung Api Semeru Tanggal 4 Desember 2021 dan 4 Desember 2022 serta pendapat para ahli serta pendapat para ahli, maka Wilayah yang terdampak kejadian Bencana Erupsi Gunung Api Semeru adalah :

2.3.1 WILAYAH TERDAMPAK

1. Kabupaten Malang

Kecamatan		Desa	
1	Ampelgading	1	Lebakharjo
		2	Argoyuwono
		3	Tamansari
		4	Mulyoasri
		5	Purwoharjo
		6	Sidorenggo
		7	Simojayan
		8	Sonowangi
		9	Tamanasri

		10	Tawangagung
		11	Tirtomarto
		12	Tirtomoyo
2	Tirtoyudo	1	Tamansatriyan
		2	Ampelgading
3	Poncokusumo	1	Ngadas
4	Wajak	1	Bambang
		2	Sumberputih

2. Kabupaten Lumajang

Kecamatan		Desa	
1	Candipuro	1	Candipuro
		2	Jarit
		3	Jugosari
		4	Kloposawit
		5	Penanggal
		6	Sumberejo
		7	Sumbermujur
		8	Sumberwuluh
		9	Tambahrejo
		10	Tumpeng
2	Pasirian	1	Bades
		2	Bago
		3	Condro
		4	Gondoruso
		5	Kalibendo
		6	Madurejo
		7	Nguter
		8	Pasirian
		9	Selok Anyar
		10	Selok Awar-Awar
		11	Sememu
3	Pasrujambe	1	Jambearum
		2	Karanganom
		3	Kertosari
		4	Pagowan
		5	Pasrujambe
4	Pronojiwo	1	Oro-oro Ombo
		2	Pronojiwo
		3	Sidomulyo
		4	Sumberurip

Kecamatan		Desa	
		5	Supiturang
		6	Tamanayu
5	Sumbersuko	1	Mojosari
		2	Sentul
		3	Purwosono
6	Tempeh	1	Gesang
		2	Jatisari
		3	Jokarto
		4	Lempeni
7	Tempursari	1	Kaliuling
		2	Purorejo
		3	Tegalrejo
8	Senduro	1	Purworejo
		2	Sarikemuning

2.3.2 ASPEK-ASPEK TERDAMPAK

Berdasarkan skenario kejadian Erupsi Gunung Api Semeru Tanggal 4 Desember 2021 dan 4 Desember 2022 serta asumsi dampak maksimum dari Peta KRB Gunung Api Semeru Sektor Tenggara (Lampiran I), maka disusunlah pengembangan skenario dampak terhadap 4 aspek yaitu : aspek kependudukan, aspek fisik/sarana prasarana, aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

1. Aspek Kependudukan	A. Penduduk Terdampak - Kabupaten Lumajang (44.232 Jiwa) - Laki-laki (22.163 Jiwa) - Perempuan (22.173 Jiwa) - Kabupaten Malang : 5.108 Jiwa - Laki-laki (2.569 Jiwa) - Perempuan (2.539 Jiwa) B. Penduduk Mengungsi - Kabupaten Lumajang (42.107 Jiwa) - Laki-laki (21.055 Jiwa) - Perempuan (21.064 Jiwa) - Kabupaten Malang (4.852 Jiwa) - Laki-laki (2.441 Jiwa)
-----------------------	---

	- Perempuan (2.412 Jiwa) Catatan : - Rincian lengkap data pilah untuk aspek penduduk terdampak dan mengungsi terlampir pada lampiran II - Data aspek kependudukan terdampak merupakan perkalian antara indeks penduduk terdampak dengan jumlah penduduk yang berada didalam KRB
2. Aspek Fisik/ Sarana dan Prasarana	A. Tempat Tinggal Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (12.711 Unit) 2. Kabupaten Malang (1.701 Unit) B. Gedung Sekolah/Perguruan Tinggi Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (93 Unit) 2. Kabupaten Malang (21 Unit) C. Gedung Perkantoran Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (25 Unit) 2. Kabupaten Malang (2 Unit) D. Sarana Ibadah Terdampak Kabupaten Lumajang (380 Unit) Kabupaten Malang (43 Unit) E. Sarana Kesehatan Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (50 Unit) 2. Kabupaten Malang (9 Unit) F. Jembatan Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (98 Unit) 2. Kabupaten Malang (28 Unit) Catatan : - Rincian lengkap data pilah sarana prasarana terdampak terlampir pada lampiran II - Data aspek fisik/sarana pra sarana terdampak merupakan perkalian antara indeks sarana prasarana terdampak dengan jumlah sarana pra sarana yang

	berada didalam KRB
3. Aspek Ekonomi	A. Rumah Makan/Restoran/Warung Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (665 Unit) 2. Kabupaten Malang (168 Unit) B. Pasar Tradisional dan Pasar Hewan Terdampak 3. Kabupaten Lumajang (8 Lokasi) 4. Kabupaten Malang (5 Lokasi) C. Pertokoan/Ruko/Minimarket Terdampak 5. Kabupaten Lumajang (2.760 Unit) 6. Kabupaten Malang (824 Unit) D. Ternak Unggas Terdampak 7. Kabupaten Lumajang (292.318 Ekor) 8. Kabupaten Malang (76.496 Ekor) E. Ternak Besar dan Kecil Terdampak 9. Kabupaten Lumajang (133.478 Ekor) 10. Kabupaten Malang (68.229 Ekor) Catatan : - Rincian lengkap data pilah aspek ekonomi terdampak terlampir pada lampiran II - Data aspek ekonomi terdampak merupakan perkalian antara indeks ekonomi terdampak dengan jumlah potensi ekonomi yang berada didalam KRB
4. Aspek Lingkungan	A. Sawah Terdampak 1. Kabupaten Lumajang (15.856 Ha) 2. Kabupaten Malang (161 Ha) B. Kebun/LadangTerdampak 3. Kabupaten Lumajang (12.589 Ha) 4. Kabupaten Malang (794 Ha) C. Tambak Terdampak 5. Kabupaten Lumajang (179 Ha)

	6. Kabupaten Malang (1 Ha) D. Mata Air Terdampak 7. Kabupaten Lumajang (115 Unit) 8. Kabupaten Malang (162 Unit) Catatan : - Rincian lengkap data pilah aspek lingkungan terdampak terlampir pada lampiran II - Data aspek lingkungan terdampak merupakan perkalian antara indeks lingkungan terdampak dengan jumlah potensi lingkungan yang berada didalam KRB
--	---

3.1. TUGAS POKOK

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Erupsi Gunung Api Semeru melaksanakan operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Api Semeru dan tugas-tugas kemanusiaan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi dilapangan secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian, penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pemulihan fungsi sarana prasarana serta mengendalikan situasi darurat. Sedangkan organisasi Penanganan Darurat Bencana Bencana Erupsi Gunung Api Semeru Jawa Timur bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendudukan dan pendampingan terhadap SKPDB Kabupaten Lumajang dan Malang.

3.2. SASARAN

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komando Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru menargetkan :

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 72 Jam;
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan unsur pentahelix dan Wilayah-wilayah terdampak;
3. Terlaksananya pengerahan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang berkomitmen dalam operasi tanggap darurat bencana;
4. Terselenggaranya 100% proses evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan;
5. Terlaksananya 90% pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
6. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia;
7. Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh;
8. Terlaksananya penyelamatan harta benda minimal 25% dari total perkiraan awal kerugian harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting, dan ternak;

9. Terselenggaranya 75% pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan dan sekolah.

Organisasi Penanganan Darurat Bencana Bencana Erupsi Gunung Api Semeru Jawa Timur melaksanakan operasi pendukungan, pendampingan serta penguatan kepada SKPDB Kabupaten Lumajang dan Malang dalam memenuhi sasaran yang target capaian SKPDB. Operasi pendukungan dan pendampingan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap/fase, yaitu fase siaga darurat, tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana Selain itu, Organisasi Penanganan Darurat Bencana Bencana Erupsi Gunung Api Semeru Jawa Timur memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

4.1. KEGIATAN POKOK SAAT KEADAAN DARURAT

Penanganan darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru meliputi upaya-upaya pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan. Berikut adalah penjelasan dari tiap fase keadaan darurat :

1. Siaga Darurat

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.

2. Tanggap Darurat

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengungsi, serta pemulihan darurat.

3. Transisi Darurat

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

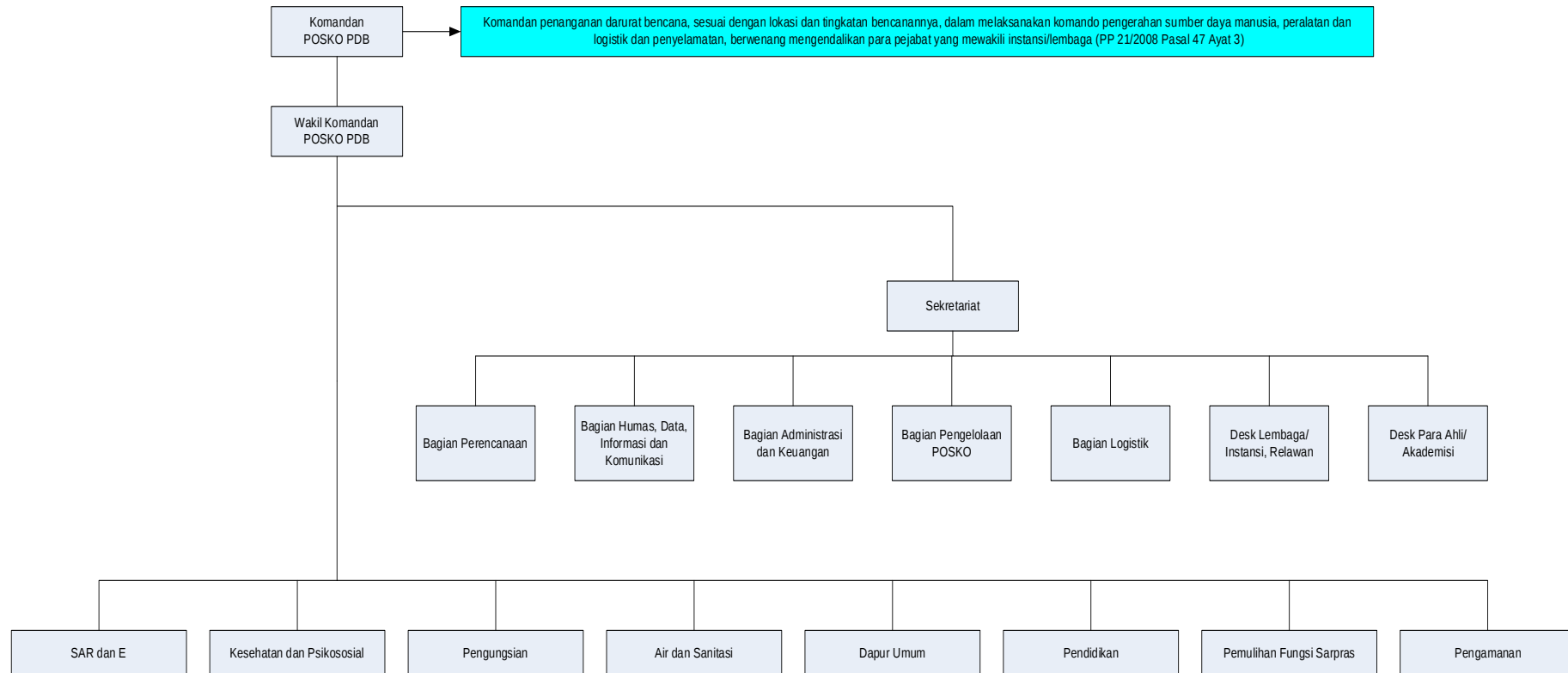
Tahap	Kegiatan Pokok
Siaga Darurat	1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Status Siaga Darurat; 2. Memantau informasi yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Semeru; 3. Menyebarkan informasi status terkait aktivitas Gunung Api Semeru;

Tahap	Kegiatan Pokok
	4. Menyiapkan sumber daya dari pihak-pihak yang terkait (Misalnya Tim Kesehatan, Tim Psikososial, dll); 5. Menyiapkan lokasi evakuasi sementara dan lokasi evakuasi akhir/pengungsian; 6. Membantu masyarakat yang berada didalam Kawasan Risiko Bencana untuk melakukan evakuasi penyelamatan nyawa dan harta benda; 7. Menyiapkan sarana prasarana yang mendukung proses evakuasi; 8. Pemberian bantuan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang melakukan proses evakuasi; 9. Menyiapkan lokasi pos-pos yang berkaitan (Posko, Pos Lapangan, Pos Pendamping, Pos Pendukung); 10. Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Status Siaga Darurat; 11. Memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat terdampak termasuk kepada kelompok rentan (Wanita, Anak-anak, Lansia, Penyandang Disabilitas); 12. Melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana dampak Erupsi Gunung Api Semeru.

Tahap	Kegiatan Pokok
Tanggap darurat	1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Status Tanggap Darurat; 2. Membentuk SKPDB; 3. Melaksanakan tugas-tugas pokok SKPDB; 4. Memantau informasi yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Semeru; 5. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi; 6. Pemberian bantuan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang terdampak bencana; 7. Memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat terdampak termasuk kepada kelompok rentan (Wanita, Anak-anak, Lansia, Penyandang Disabilitas); 8. Melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana dampak Erupsi Gunung Api Semeru termasuk bahaya ikutannya; 9. Pemulihan fungsi sarana prasarana yang terdampak bencana; 10. Penyelamatan/perlindungan atas aset penting daerah atau masyarakat;
Transisi darurat ke pemulihan	1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan; 2. Memantau informasi yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Semeru; 3. Mempersiapkan siteplan lokasi hunjara dan hunjap; 4. Melakukan studi kelayakan lokasi hunjara dan hunjap; 5. Finalisasi data masyarakat terdampak bencana; 6. Pemberian bantuan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang terdampak bencana;

Tahap	Kegiatan Pokok
	7. Memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat terdampak termasuk kepada kelompok rentan (Wanita, Anak-anak, Lansia, Penyandang Disabilitas); 8. Pemulihan fungsi sarana prasarana yang terdampak bencana; 9. Melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana dampak Erupsi Gunung Api Semeru termasuk bahaya ikutannya; 10. Penyelamatan/perlindungan atas aset penting daerah atau masyarakat.

4.2 STRUKTUR SKPDB



Gambar 1. Struktur SKPDB

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi PDB perlu menurunkan/mendetailkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang-fungsi bersama bagian/unit/divisi di bawahnya. Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia.

4.3 KEGIATAN POKOK SKPDB

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
1	Komandan PDB	- Kepala Daerah atau Orang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas Komandan PDB	- Melaksanakan koordinasi untuk mempersiapkan sumber daya yang menjadi bagian struktur SKPDB - Memantau informasi yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Semeru	- Mengaktifkan POSKO PDB Erupsi Gunung Api Semeru - Memantau informasi yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Semeru - Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana (Rencana Operasi PDB) - Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya untuk melaksanakan operasi	- Melaksanakan koordinasi untuk penetapan status transisi darurat bencana ke pemulihan bencana - Memantau informasi yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Semeru - Melaksanakan koordinasi untuk mempersiapkan tahap pemulihan bencana - Memastikan seluruh bidang/sektor telah memenuhi kebutuhan dasar pengungsi - Memastikan fungsi

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
				penanganan darurat bencana - Mengevaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana - Berkoordinasi dengan Pimpinan instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana	sarana dan prasarana layanan publik telah berjalan normal - Menginisiasi pelaksanaan kajian kebutuhan pascabencana - Mengevaluasi hasil dari kajian kebutuhan pascabencana
2	Wakil Komandan PDB	- Orang yang ditunjuk oleh Komandan PDB untuk membantu tugas-tugas Komandan PDB	- Membantu Komandan PDB dalam melaksanakan koordinasi untuk menghimpun	- Membantu Komandan PDB dalam menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi	- Membantu Komandan PDB dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan lingkungan terdampak, serta sarana dan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			sumber daya yang menjadi bagian struktur SKPDB - Membantu Komandan PDB dalam menyusun rencana operasi yang mendukung kegiatan tanggap darurat	penanganan darurat bencana (Rencana Operasi PDB) - Membantu Komandan PDB dalam melaksanakan mobilisasi/pengeralahan sumber daya untuk melaksanakan operasi penanganan darurat bencana - Membantu Komandan PDB dalam mengevaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana - Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan	prasarana layanan publik telah berjalan normal - Membantu Komandan PDB dalam melaksanakan kajian kebutuhan pascabencana - Membantu Komandan PDB mengevaluasi hasil kajian kebutuhan pascabencana

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
				serta perwakilan instansi/lembaga - Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan	
3	Perencanaan	- BPBD	- Menyusun rencana kontingensi yang mendukung kegiatan tanggap darurat (termasuk didalamnya menyusun peta respon)	- Menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana erupsi Gung Api Semeru yang merupakan aktivasi dari rencana kontingensi yang telah disusun dan disesuaikan dengan hasil asesmen awal kejadian bencana	- Menyusun rencana operasi transisi darurat ke pemulihan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
4	Humas, Data, Informasi dan Komunikasi	- Kominfo - BPBD - Aparat Pemerintahan Kecamatan/Desa - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Menyiapkan sumber daya yang mendukung kegiatan bidang humas pada saat tanggap darurat - Menyiapkan sistem yang akan mendukung kegiatan bidang humas, data, informasi dan komunikasi - Menyiapkan media center	- Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah terdampak - Melakukan pendataan penduduk terdampak, pengungsi, meninggal dan hilang - Menyiapkan sumber daya dan jalur komunikasi tanggap darurat - Melakukan update informasi terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat - Melaksanakan konferensi pers untuk menyampaikan update informasi terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat	- Melakukan updating informasi terhadap pelaksanaan operasi transisi darurat - Melaksanakan konferensi pers untuk menyampaikan update informasi terhadap pelaksanaan operasi transisi darurat - Mengumpulkan dan memberikan informasi dari/kepada masyarakat, dan media - Menyiapkan data kerugian dan kerusakan akibat bencana terhadap sektor perumahan,

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
				- Melaporkan	infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor - Melakukan pemenuhan pelayanan dan akses komunikasi dan informasi dari masyarakat dan lingkungan terdampak - Melakukan sosialisasi, komunikasi dan mediasi dengan para pengungsi terkait rencana pemindahan/relokasi menuju hunian sementara dan/atau hunian tetap - Melaporkan hasil kegiatan bidang Humas, Data, Informasi dan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
					Komunikasi kepada Komandan PDB
5	Administrasi dan Keuangan	- BPKAD - Inspektorat - BPBD	- Menyiapkan sumber daya yang mendukung kegiatan bidang administrasi dan keuangan pada saat tanggap darurat - Menyiapkan sistem yang akan mendukung kegiatan bidang administrasi dan keuangan	- Melaksanakan administrasi umum dan pelaporan - Melakukan pencatatan terhadap hasil rapat yang dilakukan selama pelaksanaan operasi tanggap darurat - Melaksanakan kaidah-kaidah arsip dinamis - Melaksanakan administrasi keuangan selama pelaksanaan operasi tanggap darurat - Mengelola penerimaan bantuan dana selama pelaksanaan operasi	- Menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan pascabencana dengan berkoordinasi bersama bidang/sektor lainnya - Mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan operasi transisi darurat bencana dan pemulihan bencana - Mempersiapkan administrasi permohonan bantuan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
				tanggap darurat - Pelibatan pendampingan dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) serta Aparat dari Unit Pengadaan Barang/Jasa	dana terkait pemulihan bencana - Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan penanganan/operasi tanggap darurat bencana - Melakukan perbaruan dan pencatatan pihak-pihak lain di luar struktur SKPDB yang berkepentingan termasuk relawan dari komunitas internasional - Menginformasikan dan menyerahkan secara operasional lebih lanjut

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
					relawan ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang dan tugas - Melaporkan hasil kegiatan bidang administrasi dan keuangan kepada Komandan PDB
6	Pengelolaan POSKO	- BPBD - TNI - POLRI - Aparat Pemerintahan Desa/Kecamatan - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Menyiapkan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas POSKO selama masa tanggap darurat - Menyiapkan lokasi POSKO	- Menyiapkan kebutuhan POSKO seperti TV Layar Besar, Infocus, Printer, Listrik, Ruang Rapat, Air dan Sanitasi/Fasilitas MCK, dll) - Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan POSKO PDB	- Melakukan persiapan penutupan Posko PDB serta memantau perkembangan pembangunan hunian sementara dan/atau hunian tetap untuk pemindahan pengungsi menuju ke hunian sementara dan/atau

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
					hunian tetap - Menyelenggarakan pelatihan kemandirian kepada pengungsi sebagai salah satu langkah persiapan pemulihan bencana - Melaporkan hasil kegiatan bidang pengelolaan Posko kepada Komandan PDB
7	Logistik	- BPBD - Dinas Sosial - Aparat Pemerintahan Kecamatan/Desa - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga	- Menyusun rencana operasi Bidang Logistik yang mendukung kegiatan tanggap darurat	- Melakukan pendataan kebutuhan logistik untuk pelaksanaan operasi tanggap darurat termasuk kebutuhan pengungsi dan petugas - Melakukan koordinasi dalam	- Menerima, melakukan pendataan, menyimpan dan mendistribusikan bantuan logistik selama masa transisi darurat bencana. - Melakukan perhitungan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
		Kemanusiaan - NGO	- Menyiapkan sumber daya yang mendukung kegiatan bidang logistik pada saat tanggap darurat termasuk unit peralatan berat yang akan memperlancar proses pendistribusian logistik - Menyiapkan tempat yang akan dijadikan gudang logistik	- pendistribusian logistik seperti bantuan pangan, bantuan non pangan dan bantuan sandang - Melakukan pendistribusian logistik seperti bantuan pangan, bantuan non pangan dan bantuan sandang - Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran logistik - Melakukan pengecekan kelayakan terhadap logistik yang diterima - Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan untuk	- kebutuhan logistik untuk operasi transisi darurat bencana dan pemulihan bencana - Bersama Bidang Humas, Data, Informasi dan Komunikasi, menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik - Menyusun dan melaporkan kebutuhan serta kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar selama transisi darurat bencana - Mendukung penyelenggaraan operasi

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			- Mempersiapkan Sistem yang akan mempermudah proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran logistik	pelaksanaan operasi tanggap darurat	Bidang Air & Sanitasi, Kesehatan & Psikososial, dan Pengungsian - Melaporkan hasil kegiatan bidang logistik kepada Komandan PDB
8	Desk Lembaga/Instansi, Relawan	- SRPB - FPRB - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan selama masa tanggap	- Melakukan pendataan organisasi relawan serta sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tanggap darurat - Melaksanakan koordinasi dengan Komandan PDB/Wakil Komandan PDB	- Melakukan pendataan kepulauan organisasi relawan serta sumber daya yang telah selesai melakukan operasi penanganan tanggap darurat bencana - Melakukan pendataan kedatangan organisasi

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			darurat	untuk pendistribusian Relawan serta sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tanggap darurat	relawan serta sumber daya yang terlibat dalam operasi pemulihan - Melaporkan hasil kegiatan desk lembaga/instansi/relawan kepada Komandan PDB
9	Desk Para Ahli/akademisi	- Para Ahli dari berbagai Lembaga/Instansi maupun dari Perguruan Tinggi - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan selama masa tanggap darurat	- Mendukung operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Lembaga/Instansi/Perguruan Tinggi misalnya pemetaan wilayah terdampak	- Melakukan evaluasi terhadap hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana - Mendukung penyelenggaraan pelatihan kemandirian kepada pengungsi - Mendukung, mendorong, mengawasi dan mengevaluasi penerapan teknologi tepat guna dan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
					berhasil guna selama penanganan darurat bencana hingga pemulihan pascabencana - Melakukan kajian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan sistem peringatan dini bencana erupsi Gunung Api
10	SARE	- BASARNAS - BPBD - Dinas Sosial - TNI - POLRI - SATPOL PP - Organisasi Relawan	- Menyusun rencana operasi Bidang SAR dan Evakuasi yang mendukung kegiatan tanggap darurat	- Melaksanakan koordinasi Tim SAR dan Evakuasi gabungan untuk melaksanakan kegiatan bidang SAR dan Evakuasi - Melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan	- Menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang SAR dan Evakuasi selama transisi darurat bencana - Mengoordinasikan,

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
		- Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan bidang SAR dan Evakuasi selama masa tanggap darurat - Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan bidang SAR dan	- sumber daya yang mendukung proses SAR dan Evakuasi seperti alat berat, kendaraan evakuasi, dll - Menyiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan bidang SAR dan Evakuasi - Melakukan proses SAR dan Evakuasi terhadap manusia maupun hewan ternak yang terdampak bencana - Memastikan keselamatan seluruh personil Tim SAR gabungan - Melaporkan hasil kegiatan bidang operasi SAR dan Evakuasi kepada Komandan PDB	- mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi di lapangan - Menyelenggarakan penanganan identifikasi korban meninggal massal - Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bekerjasama dengan Bidang Humas, Data, Informasi dan Komunikasi

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			Evakuasi selama masa tanggap darurat		- Melaporkan hasil kegiatan bidang SARE kepada Komandan PDB
10	Kesehatan dan Psikososial	- Dinas Kesehatan - Pusat Krisis Kesehatan - RS - PUSKESMAS - TNI - POLRI - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan dan Psikososial selama masa tanggap darurat - Menyiapkan sumber daya yang	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan dan psikososial - Melakukan RHA (Rapid Health Assessment) bidang kesehatan dan psikososial - Melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Kesehatan dan Psikososial - Mengoptimalkan sumber	- Mengupayakan pemenuhan kebutuhan SDM, obat, bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korban terdampak dan pengungsi selama masa transisi darurat - Memastikan terpenuhinya kebutuhan psikososial korban bencana khususnya anak-anak

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			mendukung kegiatan Bidang Kesehatan dan Psikososial selama masa tanggap darurat	daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan dan Psikososial - Menyiapkan tim triage untuk pemilahan korban - Mengevakuasi korban luka ringan dan sedang ke pos kesehatan atau faskes terdekat - Memberikan pelayanan kesehatan dan psikososial (pemeriksaan, konsultasi, pengobatan, operasi minor, mobilisasi logistik pendamping ASI, trauma healing, dll) - Melakukan upaya-upaya	dan kelompok rentan - Melakukan penguatan psikososial pada komunitas sebagai salah satu faktor yang penting untuk keberlanjutan dari program yang dijalankan - Menyiapkan konsep ruang terbuka ramah anak untuk diaplikasikan di lokasi sekitar Hunian Sementara dan/atau Hunian Tetap - Psikoedukasi untuk orang tua tentang stabilisasi emosi - Perawatan diri bagi relawan dan petugas

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
				promosi kesehatan - Melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit yang akan timbul saat terjadi bencana terutama di lokasi-lokasi pengungsian - Memberikan pelayanan rujukan - Berkoordinasi dengan Tim DVI (Disaster Victim Identification) untuk identifikasi korban meninggal - Melakukan pendataan terhadap korban luka dan meninggal - Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan	- Melaporkan hasil kegiatan bidang kesehatan dan psikososial kepada Komandan PDB

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
				pemulasaran - Melaporkan hasil kegiatan bidang kesehatan dan psikososial kepada Komandan PDB	
11	Pengungsian	- BPBD - Dinas Sosial - TNI - POLRI - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Pengungsian selama masa tanggap darurat - Menyiapkan sumber daya	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar lokasi pengungsi serta kebutuhan dasar pengungsi - Menyiapkan lokasi pengungsian beserta kebutuhan dasar lokasi pengungsian - Menyiapkan tempat	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi hunian sementara dan/atau hunian tetap - Memastikan tersedianya hunian sementara dan/atau hunian tetap sebelum ditetapkan sebagai akhir dari status darurat bencana - Memastikan tempat pengungsian memenuhi

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			yang mendukung kegiatan Bidang Pengungsian selama masa tanggap darurat - Mengidentifikasi serta menyiapkan lokasi yang akan menjadi tempat pengungsian	bermain bagi anak-anak - Menyiapkan ruang/bilik asmara - Melaksanakan pencatatan penerimaan pengungsi - Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi - Mendistribusikan paket family kit bagi para pengungsi - Melaporkan hasil kegiatan bidang pengungsian dan psikososial kepada Komandan PDB	standar protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari transmisi penyakit menular - Memastikan terpenuhinya pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi. - Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik Perwakilan Perangkat

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
					Daerah/ Instansi/Lembaga terkait - Melaporkan hasil kegiatan bidang pengungsian kepada Komandan PDB
12	Air dan Sanitasi	- BPBD - DLH - PDAM - TNI - POLRI - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan bidang air dan sanitasi selama masa tanggap darurat - Menyiapkan	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang air dan sanitasi - Menyediakan air bersih dan air minum yang mencukupi beserta sarana pendukungnya seperti tandon, pipanisasi, kran air, dll - Menyediakan fasilitas MCK	- Melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana air bersih dan air minum - Melakukan monitoring dan evaluasi dari penggunaan air terhadap dampak kesehatan pengungsi dan petugas - Memastikan pembuangan limbah tidak mencemari sumber air dan air tanah di

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Bidang Air dan Sanitasi selama masa tanggap darurat	bagi para pengungsi dan petugas - Menyiapkan sumber daya yang mendukung kebersihan lokasi pengungsian seperti tempat sampah, dll - Membuat saluran limbah di lokasi pengungsian - Mendukung proses pembersihan sarana prasarana umum - Melaporkan hasil kegiatan bidang air dan sanitasi kepada Komandan PDB	lingkungan sekitar lokasi pos dan pengungsian. - Melakukan pengelolaan limbah dan memastikan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan setelah status darurat bencana berakhir - Menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan air dan kelayakan sanitasi pada lokasi hunian sementara dan/atau hunian tetap - Melaporkan hasil kegiatan bidang air dan sanitasi kepada Komandan PDB

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
13	Dapur Umum	- BPBD - DINSOS - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Dapur Umum selama masa tanggap darurat - Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Bidang Dapur Umum selama masa	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi dapur umum beserta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan - Mendirikan dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pengungsi dan petugas operasi tanggap darurat - Melakukan pencatatan terhadap kebutuhan konsumsi pengungsi dan petugas - Berkoordinasi dengan bidang logistik terkait ketersediaan logistik/bahan	- Berkoordinasi secara lebih intensif dengan Bidang Administrasi & Keuangan, Bidang Desk Instansi/Lembaga & Relawan, serta Bidang Pengungsian terkait pendataan jumlah konsumsi yang harus dipenuhi baik dari petugas maupun korban/pengungsi - Mempersiapkan penutupan dapur umum apabila status darurat bencana berakhir - Mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			tanggap darurat	mentah untuk kebutuhan dapur umum - Berkoordinasi dengan bidang air dan sanitasi terkait pemenuhan kebutuhan air untuk pengungsi dan petugas - Mendistribusikan konsumsi bagi pengungsi dan petugas - Melaporkan hasil kegiatan bidang dapur umum kepada Komandan PDB	terkait dapur umum mandiri bagi pengungsi/korban bencana - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan dapur umum. - Melaporkan hasil kegiatan bidang dapur umum kepada Komandan PDB
14	Pendidikan	- Dinas Pendidikan - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi serta sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pendidikan	- Bersama masyarakat, menyusun strategi transisi dari pembelajaran dalam situasi darurat bencana ke pembelajaran normal.

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan selama masa tanggap darurat - Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Bidang Pendidikan selama masa tanggap darurat	- Melaksanakan pendataan siswa - Menyiapkan lokasi serta sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pendidikan - Menyiapkan kebutuhan siswa/paket pendidikan darurat untuk proses belajar mengajar - Melaporkan hasil kegiatan bidang pendidikan kepada Komandan PDB	- Melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan kondisi psikososial siswa - Memastikan dan mendukung pemulihan fungsi, sarana dan prasarana pendidikan di sekitar lokasi bencana. - Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak sekolah di sekitar lokasi bencana terkait penyelenggaraan pendidikan di masa pemulihan pascabencana - Melaporkan hasil kegiatan bidang pendidikan kepada

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
					Komandan PDB.
15	Pemulihan Fungsi Sarpras	- Dinas PU (BM, PUPR, CK, SDA) - BBWS - TNI - POLRI - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Pemulihan Fungsi Sarpras dan Pemukiman selama masa tanggap darurat - Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pemulihan fungsi sarpras dan pemukiman - Membuka akses jalan alternatif agar pelaksanaan evakuasi lebih efektif - Pemulihan fungsi sarpras vital seperti sarana kesehatan, tempat ibadah, dll - Melaporkan hasil kegiatan bidang pemulihan sarpras dan pemukiman kepada Komandan PDB	- Menyiapkan sarana angkutan untuk pemulangan alat-alat berat - Mulai dilaksanakannya pembangunan hunian sementara/hunian tetap - Memastikan pulihnya fungsi sarana dan prasarana vital serta akses jalan - Melaporkan hasil kegiatan bidang pemulihan sarpras dan pemukiman kepada Komandan PDB

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			kegiatan Bidang Pemulihan Fungsi Sarpras dan Pemukiman selama masa tanggap darurat		
16	Pengamanan	- TNI - POLRI - SATPOL PP - DISHUB - Organisasi Relawan - Organisasi/Lembaga Kemanusiaan - NGO	- Melaksanakan koordinasi untuk menghimpun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan selama masa tanggap darurat - Menyiapkan	- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pengamanan - Menyiapkan pos check poin untuk membatasi/mengontrol yang bisa masuk ke lokasi bencana - Memastikan keamanan distribusi logistik	- Menyiapkan kebutuhan personil keamanan di lokasi Desa terdampak yang ditinggalkan warganya mengungsi - Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembekalan pengetahuan serta pelatihan kepada SATLINMAS tentang penanggulangan

No	Struktur SKPDB	Pelaku	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
			sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Bidang Pengamanan selama masa tanggap darurat	- Memastikan keamanan di lokasi POSKO, lokasi Pos Lapangan, Lokasi Pos Dukungan, Lokasi Pos Pendampingan, lokasi pengungsian, gudang logistik - Melaporkan hasil kegiatan bidang pengamanan kepada Komandan PDB	- bencana, keamanan dan pengamanan - Mendelegasikan secara bertahap tugas pengamanan lokasi POSKO, lokasi Pos Lapangan, Lokasi Pos Dukungan, Lokasi Pos Pendampingan, lokasi pengungsian, gudang logistik kepada SATLINMAS sekitar - Melaporkan hasil kegiatan bidang pengamanan kepada Komandan PDB

4.4 INSTRUKSI KOORDINASI

Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana mengeluarkan instruksi koordinasi kepada seluruh Pimpinan Bidang Operasi/Klaster untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Perintah Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut :

1. Mendirikan POSKO PDB;
2. Mengaktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi PDB;
3. Melaksanakan proses pencarian, penyelamatan dan Evakuasi;
4. Menyegerakan pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak;
5. Memberikan pelayanan kesehatan, sosial serta kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas;
6. Mengoptimalkan kerjasama dengan sumberdaya dari kawasan terdekat yang tidak terdampak bencana;
7. Menyiapkan gudang logistik;
8. Melaksanakan semua kegiatan operasi penanganan darurat bencana dengan terencana;
9. Memerhatikan faktor keamanan wilayah termasuk keamanan pengungsi.

BAB 5.

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. ADMINISTRASI

Mekanisme administrasi rencana dukungan anggaran keuangan dalam penanganan darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru di Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum);
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan instruksi pada Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten;
4. Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan dan keuangan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten;
5. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Penetapan SK Tanggap Darurat;
 - b. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat;
 - c. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima;
 - d. BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. Badan Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten;

- f. Badan Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja;
- g. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6 tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat;
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat;
 - 3) Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke BNPB;
 - 4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima;
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah;
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - 7) Kepala BPBD Kabupaten berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP);
- e. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Bencana Erupsi Gunung Api Semeru di Kabupaten adalah sebagai berikut.

No	Jenis	Sumber Keuangan
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga: Pemprov
3	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga: Pemkab
4	Swasta	Donasi CSR
5	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat yang dikelola FPRB dari berbagai sumber non pemerintah
6	Akademisi	Donasi dunia pendidikan
7	Masyarakat	Donasi: Kelompok siaga bencana, PKK, KSP, GOW (Gerakan Organisasi Wanita) dll

5.2. LOGISTIK

Mekanisme logistik dalam penanganan darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru di Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar;
2. Menyiapkan tempat/gudang yang memenuhi standar untuk penyimpanan

logistik bantuan maupun pengadaan;

3. Permintaan bantuan kebutuhan dan peralatan dasar ke Pemerintah Pusa, Provinsi dan kabupaten terdekat;
4. Kerjasama dengan multipihak untuk pengadaan logistik;
5. Mendistribusikan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak tepat sasaran dan tepat waktu;
6. Memastikan penerimaan bantuan melalui satu pintu (tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO);

BAB 6.

KEBUTUHAN, KETERSEDIAAN, KESENJANGAN DAN STRATEGI PEMENUHAN SUMBER DAYA

6.1. KEBUTUHAN, KETERSEDIAAN DAN KESENJANGAN SUMBER DAYA

Rekapitulasi kebutuhan, ketersediaan dan kesenjangan sumber daya dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Semeru untuk Kabupaten Lumajang dan Malang terlampir pada lampiran III.

6.2. STRATEGI PEMENUHAN SUMBER DAYA

A. Rencana Dukungan Sumber Daya Manusia

Strategi yang harus dilakukan dalam rencana dukungan sumber daya manusia yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang ada di Kabupaten dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru;
- Melakukan koordinasi dengan berbagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemanusiaan/NGO terkait yang ada di Kabupaten dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru;
- Melakukan koordinasi dengan berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru;
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru.

B. Rencana Dukungan Peralatan

Strategi yang harus dilakukan dalam rencana dukungan sumber daya peralatan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang ada di Kabupaten dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru;
- Melakukan koordinasi dengan berbagai Organisasi

Kemasyarakatan/Lembaga Kemanusiaan/NGO terkait yang ada di Kabupaten dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru;

- Melakukan koordinasi dengan berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru;
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Api Semeru.

7.1. KOMANDO

Penanganan darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru di Kabupaten dipimpin oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan tugas utama :

1. Komando Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun secara baik dan profesional antar pihak terkait;
2. Berkoordinasi dengan para pihak terkait yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana.

7.2. POS KOMANDO, POS AJU, POS PENDUKUNG, POS PENDAMPING DAN POS LAPANGAN

Beberapa alternatif lokasi Pos Komando, Pos Aju, Pos Pendukung, Pos Pendamping dan Pos Lapangan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Semeru tercantum pada Lampiran IV.

7.3. KOMUNIKASI

Komandan Pos Komando bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Semeru. Alat komunikasi Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten adalah :

1. Telepon genggam/HP/WhatsApp : 0813-2355-5900
2. Radio VHF :
 - Frekuensi masuk: 158.365 MHZ
 - Frekuensi keluar: 162.130 MHZ

BAB 8.

RENCANA TINDAK LANJUT

8.1 KOMITMEN PARA PIHAK DALAM PENANGANAN KEDARURATAN

Agar dokumen Rencana Kontingensi dapat dijaga kekiniannya, maka diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam rangka memperkuat dan mengikat partisipasi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah.

8.2 LATIHAN KESIAPSIAGAAN

Setelah disusun, Rencana Kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara dibawah ini. Uji latih kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di Tingkat Daerah yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Dipimpin oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Komandan POSKO yang ditunjuk;
- Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam Rencana Kontingensi;
- Kesiapan pihak terkait pada masing-masing bidang SKPDB terhadap situasi tersebut;

2. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku

kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi posko ini bertujuan memastikan:

- Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kontingensi, baik perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang digunakan;
- Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya, untuk menghitung waktu tempuh dan jenis rekayasa lalu lintas apa yang harus diterapkan, jika diperlukan.

3. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.